

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chulaemi, Achmad. 1996.*Hukum Agraria, Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*. Semarang: FH-UNDIP.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2008.*Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hasan, M.Iqbal. 2002.*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusuma, Sudikno. 1998. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka.
- Mustafa, Bachsan. 1984.*Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Bandung: Remaja Karya CV.
- Nazir, Moh. 2014.*Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, A.P. 1973.*Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. Bandung: Alumni.
- Perangin, Effendi. 1994.*Praktik Jual Beli Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, K. Wantjik. 1979.*Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Urip. 2010.*Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2010.*Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990.*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugangga, I.G.N. 1994.*Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sukardi.2005.*Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Supriadi. 2007.*Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2010.*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar grafika.

_____. 2012.*Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjodipoero, Soerojo. 1982.*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Agung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian izin Pemindahan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

C. JURNAL

- Cintyana, Marindi. 2012. *Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan Atas Tanah Bersertipikat*. Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Osingmahi, Nixon G. L. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*. Masalah – Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 44 No.2.

D. WEBSITE

<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-PRONA>